

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	3,6 Trilyun	3,6 Trilyun	3,6 Trilyun	3,6 Trilyun	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan pada LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	34.791.450	34.791.450	34.791.450	34.791.450
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.035.500	12.035.500	12.035.500	12.035.500
							Persentase penyerapan Anggaran SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 59,699,950	6,685,000 59,699,950	0 59,699,950	6,685,000 59,699,950

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat		B (85)		B (85)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase aset yang tercatat (harus 100%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumentasi Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah aset yang diadakan	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	493.510.000	0	0	0
											0	65,000,000	0	0
											0	234.969.900	0	0
											139,267,500	139,267,500	139,267,500	139,267,500
											93,231,873	93,231,873	93,231,873	93,231,873
											24,842,500	24,842,500	24,842,500	24,842,500

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SOPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	keuangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,642,125	7,642,125	7,642,125	7,642,125
										Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	3,983,750	3,983,750	3,983,750	3,983,750
											126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000
											123550475	123550475	123550475	123550475

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8,785,750	8,785,750	8,785,750	8,785,750
											3,703,500	3,703,500	3,703,500	3,703,500
											12,498,250	12,498,250	12,498,250	12,498,250
							Jumlah kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman Modal	5,046,000	10,860,000	24,880,000	9,011,000
							Jumlah potensi investasi daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman	4.280.000	10.860.000	18.880.000	15.573.000
								Program pengembangan Iklim Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	115.370.000	73.883.000	118.228.000	8.044.000

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Nilai persetujuan investasi/rencana investasi	Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman modal kewenangan provinsi	77.396.000	75.786.000	67.205.000	45.870.000
											115.721.610	99.252.330	285.352.440	145.380.000
							Nilai IKM penanganan (pelayanan) pengaduan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengaduan diselesaikan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	147.210.000	139.650.000	146.660.000	138.900.000
											16.776.000	11.816.000	4.960.000	0
											8.175.000	32.675.000	47.154.800	8.175.000

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
									1, Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan 2. Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	149.783.000	169.033.500	121.307.000	114.45
							Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	Program Pengendalian Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35,349,000	52,496,000	52,081,000	28,878
									Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6.700.000	9.740.000	20.256.000	4.344
											48.527.900	36.672.000	27.932.000	22.384
							Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Non Perizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.257.000	97.215.000	59.313.000	41.092

Banjarbaru,

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620513 198903 1 011